
ARTICLE

Komparasi Tata Kelola Pariwisata di Kabupaten Tanggamus (Studi pada Destinasi Wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman)

Diana Saputri^{1*}, Dian Kagungan², dan Dodi Faedlulloh³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Saputri, D., Kagungan, D., Faedlulloh, D. (2025). Komparasi Tata Kelola Pariwisata di Kabupaten Tanggamus (Studi pada Destinasi Wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman) . *Administrativa*, 7 (2)

Article History

Received: 16 Januari 2025

Accepted: 1 Maret 2025

Keywords:

Governance

Management

Tourism

ABSTRACT

The issue of tourism governance in tourist attractions in Tanggamus Regency still needs more attention. So that improvements and additional insights are needed for tourist attraction managers in organizing and managing tourist attractions. There are several tourist attractions in Tanggamus Regency that are managed by the government and private such as the Way Lalaan Waterfall tourist attraction managed by the Tourism Office and the Bukit Idaman tourist attraction managed by the private sector. Good governance can be measured through several factors namely, Positive culture Constructive communication and engaged communities, transparency and accountability, vision and leadership, acceptance in diversity (tolerance), developing knowledge, learning and sharing expertise, clear participant roles and responsibilities, clear operational structures and out-of-network processes. This study aims to describe and analyze how tourism governance in two tourist attractions, namely Way Lalaan Waterfall and Bukit Idaman tourist attraction in Tanggamus Regency by comparing governance in two tourist attractions. The method used is a descriptive qualitative research method from data collection with interviews, observations, and documentation.

The results of this study after comparing the two governances of the two tourist attractions were found that the results of tourism governance at the Way Lalaan Waterfall tourist attraction were better than the Bukit Idaman tourist attraction by referring to the 7 indicators used in this study. This is supported by stakeholders in the governance of the Way Lalaan Waterfall tourist attraction which is very complex because it consists of local governments, the private sector and also community elements. However, there is a shortcoming in one indicator in the tourism governance of Way Lalaan Waterfall, which is Transparent and accountable, namely in terms of budgeting funds must pass through many stakeholders.

ABSTRAK

Permasalahan mengenai tata kelola pariwisata di objek wisata pada Kabupaten Tanggamus masih perlu memerlukan perhatian lebih. Sehingga dibutuhkan perbaikan dan tambahan wawasan para pengelola objek wisata dalam pengorganisasian dan pengelolaan objek wisata. Terdapat beberapa objek wisata di Kabupaten Tanggamus yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta seperti

Kata Kunci:

Tata Kelola

Manajemen

Pariwisata

* Corresponding Author

Email : saputridiana99@gmail.com

Objek wisata Air Terjun Way Lalaan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Objek wisata Bukit Idaman yang dikelola oleh swasta. Tata kelola yang baik dapat diukur melalui beberapa faktor yaitu, Budaya positif Komunikasi konstruktif dan komunitas yang terlibat, transparan dan akuntabilitas, visi dan kepemimpinan, penerimaan dalam keberagaman (toleransi), mengembangkan pengetahuan, belajar dan berbagi keahlian, peran dan tanggung jawab peserta yang jelas, struktur operasional yang jelas dan proses di luar jaringan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bagaimana tata kelola pariwisata pada dua objek wisata yaitu Objek wisata Air Terjun Way Lalaan dan Objek wisata Bukit Idaman di Kabupaten Tanggamus dengan mengkomparasi tata kelola pada dua objek wisata. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dari pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini setelah mengkomparasi dua tata kelola pada dua Objek Wisata ialah didapati hasil tata kelola pariwisata pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan lebih baik daripada objek wisata Bukit Idaman dengan merujuk pada 7 indikator yang digunakan pada penelitian ini. Hal ini didukung dengan *stakeholder* tata kelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan yang sangat kompleks karena terdiri atas pemerintah daerah, swasta dan juga elemen masyarakat. Namun terdapat kekurangan pada satu indikator pada tata kelola pariwisata Air Terjun Way Lalaan ialah Transparan dan akuntabilitas yaitu dalam hal penganggaran dana harus melewati banyak *stakeholder*.

A. PENDAHULUAN

Tata kelola pariwisata tidak terlepas dari aktivitas yang dapat mendukung dalam perekonomian suatu daerah yang juga berkaitan dengan pelestarian lingkungan, daya tarik dan ciri khas tersendiri suatu objek wisata, serta kelompok sosial maupun komunitas yang bersangkutan dengan pengelolaan objek wisata. Pengelolaan suatu destinasi wisata bukan hanya berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata itu sendiri namun bagaimana para pelaku terlibat mampu menjaga kelestarian alam, kemajemukan budaya, adat istiadat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 4 tentang Kepariwisata, menyebutkan 10 tujuan penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang memiliki berbagai macam potensi alam yang dapat dikembangkan. Keindahan alam dan keanekaragaman adat dan budaya merupakan modal dasar yang dapat dikembangkan menjadi produk wisata menarik bagi wisatawan untuk datang ke Kabupaten Tanggamus. Beberapa potensi wisata Tanggamus menyuguhkan panorama yang indah berupa pantai-pantai di antaranya terdapat Pantai Gigi

Hiu, Teluk Kiluan, dan Taman Wisata Muara Indah. Tanggamus juga kaya akan air terjun dimana terdapat Air terjun Way Lalaan, Air Terjun Tirai, Air Terjun Batu Lapis, dan masih banyak yang lainnya. Tanggamus juga dikenal sebagai kabupaten dengan memiliki dataran tinggi sehingga terdapat beberapa potensi wisata yang menyuguhkan pemandangan dari dataran tinggi seperti Bukit Idaman dengan memperlihatkan *view* Gunung Tanggamus dan juga keindahan pemukiman penduduk Gisting dan masih banyak lagi objek wisata yang ada di Tanggamus dan dapat dinikmati oleh wisatawan.

Beberapa potensi wisata Tanggamus yang kemudian dikelola menjadi destinasi wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara di antaranya yaitu Air Terjun Way Lalaan dan juga Bukit Idaman yang menyuguhkan panorama alam yang asri.

Pengelolaan pariwisata dalam upaya pengembangan objek wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman tidak akan berhasil tanpa adanya perhatian dari multi pihak dalam pengelolaan keberhasilan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya objek wisata ini diharapkan dapat membantu pemerintah setempat maupun swasta dalam memberdayakan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang mandiri. Pada dasarnya dalam pembangunan kepariwisataan tidak terlepas pada sumber daya dan juga keunikan komunitas lokal yaitu masyarakat melalui POKDARWIS Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman.

Pada Penelitian ini memfokuskan pada dua tempat, dimana dalam suatu tata kelola bisa dikatakan lebih baik jika dilakukan adanya suatu komparasi atau perbandingan untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan tata kelola pada masing-masing objek wisata yaitu pada Air Terjun Way Lalaan yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus yang juga melibatkan pihak swasta, dan juga POKDARWIS Air Terjun Way Lalaan dan objek wisata Bukit idaman yang dikelola langsung oleh pihak swasta dengan melibatkan masyarakat sekitar objek wisata. Dengan perbedaan tata kelola pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Bukit Idaman yang dikelola oleh swasta maka akan berpengaruh pada hasil yang tercipta akan perbedaan tata kelola tersebut. Pada Kabupaten Tanggamus terdapat banyak objek wisata yang menarik dan indah namun belum semua objek wisata tersebut telah dikelola dengan baik dan mendapat perhatian dari pemerintah.

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil penelitian di Kabupaten Tanggamus untuk melakukan komparasi atau perbandingan terhadap dua objek wisata yang ada di sana dalam melihat apakah tata kelola akan lebih baik jika ada campur tangan pemerintah atau justru hanya dengan pengelola swasta suatu objek wisata akan lebih baik. Kemudian, dengan melakukan pengidentifikasian atas karakteristik tata kelola dan studi komparasi karakteristik tata kelola terhadap dua wilayah merupakan sebuah tahap dalam perencanaan kepariwisataan. Dengan melakukan penelitian pada dua sektor pariwisata dalam satu wilayah, baik dalam perspektif perkembangannya karakteristik tata kelolalnya maka kita akan mengetahui bagaimana integritas suatu system tata kelola kepariwisataan yang ideal. Lebih lanjut peneliti ingin melihat dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada tata kelola pariwisata di dua objek wisata tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Konsep Pariwisata

Pariwisata menurut Kodyat dalam Amaliya (2017) adalah suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, yang bersifat sementara, dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok, sebagai suatu usaha dalam mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Pariwisata juga merupakan suatu aktivitas yang terjadi tanpa adanya batasan ruang dan waktu serta melibatkan manusia dari berbagai kalangan belahan dunia dimana di dalamnya ada interaksi yang terjadi satu sama lain sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing, dalam situasi ini terbentuknya proses akulturasi.

Proses akulturasi menurut Poespowardjo dalam Amaliya (2017) dimana proses akulturasi dapat mendatangkan dominasi dan inegrasi. Dimana jika proses akulturasi bisa

mendatangkan dominasi 17 kebudayaan asing, hal ini dapat memusnahkan *local genius* sebagai suatu cerminan identitas budaya setempat. Tetapi jika integrasi yang didatangkan, maka masyarakat akan mampu menyerap unsur-unsur kebudayaan asing dalam memperkokoh budaya setempat, yang juga dapat menambah daya tahan dalam pengembangan identitas budaya masyarakat setempat. Banyak terdapat jenis pariwisata, namun pemerintah memberikan suatu arahan kebijakan dalam memprioritaskan beberapa jenis pariwisata. Tujuan dalam hal ini agar pemerintah menonjolkan ciri khas pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Tanggamus.

Tinjauan Pengembangan Pariwisata

Destinasi dapat dikatakan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya terdapat suatu aktivitas wisata. Dalam meningkatkan potensi wisata untuk tercipta hasil yang maksimal daripada sebelumnya. Yoeti dalam Amaliya (2017) mengatakan pengembangan merupakan suatu usaha atau cara untuk memajukan dan juga pengembangan pada suatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan juga manfaat bagi masyarakat sekitar wisata. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan matang sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya.

Peran pariwisata dalam pembangunan suatu Negara ditarik garis besar berintikan dari tiga segi diantaranya segi ekonomi (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan pekerjaan), dan segi kebudayaan seperti memperkenalkan budaya lokal pada wisatawan asing, maupun wisatawan domestik yang kian meningkatkan peranannya juga. Pengembangan pariwisata juga memiliki peran penting dalam kemajuan suatu sektor perekonomian suatu daerah. Dengan adanya pengembangan pariwisata lokal, maka suatu masyarakat akan lebih mengenal dan melestarikan potensi budaya daerahnya. Pemahaman dan juga pengenalan masyarakat terhadap potensi pariwisata yang dimiliki daerahnya akan memupuk rasa cinta terhadap tanah air, karena potensi pariwisata Indonesia tidak kalah dengan Negara lain.

Label DMO (*Destination Management Organization*) merupakan suatu inovasi terbaru pengembangan tata kelola daerah tujuan wisata yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. DMO dikenal sebagai suatu pengelolaan destinasi pariwisata terstruktur dan sinergis dengan memanfaatkan suatu jejaring informasi dan juga teknologi tersistem secara terpadu dimana ada peran serta masyarakat di dalamnya, pelaku/kelompok, industri, akademisi serta pemerintah setempat. Hal ini ditujukan dalam melihat suatu kualitas untuk pengelolaan pariwisata, volume pengunjung, lamanya tinggal serta besaran pengeluaran masing-masing wisatawan serta juga manfaat yang ada bagi masyarakat sekitar. (Safitri, t.t. 2019)

Tipe Tata Kelola Lingkungan

Tata kelola adalah topik yang telah lama dipelajari oleh para sarjana organisasi (lih.

Mizruchi 1983; Westphal dan Zajac 1995) dalam (Provan & Kenis, 2008). Secara Tradisional, tata kelola dalam suatu perusahaan bisnis difokuskan pada peran dewan direksi dalam mewakili serta melindungi kepentingan dari pemegang saham (Fama dan Jensen, 1983). Tata kelola juga dipelajari dalam konteks nirlaba, meskipun focus tata kelola secara umum merupakan pada peran dewan pengawas, juga sebagai suatu untuk mewakili dan melindungi kepentingan anggota masyarakat atau konstituen politik penting lainnya (Provan, 1980).

Menurut beberapa penulis (Bramwell & Lane, 1999; Balai, 1999; Timotius, 1999) dalam (Erkuş-Öztürk & Eraydın, 2010), kerjasama dan kolaborasi merupakan isu utama dalam arena perencanaan pariwisata, dan terkait dengan gagasan pembangunan pariwisata

berkelanjutan. Untuk alasan ini, administrasi pariwisata nasional mencari cara baru untuk memfasilitasi kolaborasi antara kementerian terkait dan bekerja dalam kemitraan dengan berbagai aktor, termasuk organisasi non pemerintah, sektor swasta, dan kelompok profesional dan sukarela/masyarakat untuk melaksanakan inisiatif pariwisata strategis.

Dalam literatur pariwisata, struktur, proses dan karakteristik relasional telah diperiksa dalam badan yang muncul dari beasiswa jaringan pariwisata (lihat 21 misalnya Dredge, 2006; Scott et al., 2008) dalam (Beaumont & Dredge, 2010). Fokus dari beasiswa ini telah mengeksplorasi dampak dari pengaturan jaringan yang berbeda pada komunikasi pemangku kepentingan, kepercayaan, legitimasi dan generasi dan transfer pengetahuan, dan bagaimana, sebagai hasilnya, jaringan telah bekerja sama.

Kerangka kerja di bawah ini merupakan adaptasi dari elemen klasifikasi jaringan tata kelola (Erkuş-Öztürk & Eraydın, 2010), persepsi pemangku kepentingan (Provan & Kenis, 2008) tentang EGN, dan karakteristik jaringan menurut (Beaumont & Dredge, 2010) tentang ketegangan, dan parameter efektivitas jaringan tata kelola. Dalam kerangka yang diusulkan, EGN dipandang sebagai organisasi kolaboratif yang menyatukan sekelompok pemangku kepentingan dalam mengejar tujuan bersama untuk melestarikan lingkungan, sambil mengakomodasi pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya.

Parameter Environmental Governance Network terdiri dari sebagai berikut yang terdiri dari 7 indikator:

1. Budaya positif, Komunikasi ikonstruktif, komunitas yang terlibat, yaitu menganalisis budaya yang tercipta, komunikasi yang dilakukan dan dari sektor mana saja yang ikut berkontribusi dalam melakukan tata kelola suatu pariwisata.

2. Transparan dan akuntabilitas. Merupakan parameter penting dari tata kelola yang baik karena menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, memberi wewenang pada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan dalam suatu sistem tata kelola kepariwisataan yang dapat dipertanggung jawabkan setelahnya.

3. Visi dan kepemimpinan. Indikator ini dapat dilihat sebagai kemampuan manajer dalam mengelola suatu organisasi atau mengelola seluruh kegiatan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi sebagai tujuan untuk melancarkan pelaksanaan prinsip tata kelola pariwisata yang baik.

4. Penerimaan dalam keberagaman (toleransi). Indikator ini dapat dimaknai sebagai bentuk toleransi terhadap keberagaman yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Mulai dari pemerintah, pengelola wisata, masyarakat sekitar, hingga wisatawan. Apabila suatu pariwisata dapat dikelola dengan baik, maka pariwisata itu dapat menjadi wadah untuk lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan objek wisata.

5. Mengembangkan pengetahuan, belajar dan berbagi keahlian. Indikator ini bertujuan sebagai upaya untuk menggali lebih dalam kemampuan para pemangku dari berbagai sektor pendukung pariwisata dan manfaat yang ditimbulkan dari hubungan dengan lingkungan sekitar objek wisata.

6. Peran dan tanggung jawab peserta yang jelas. Pada indikator ini organisasi berupaya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar melalui pengelolaan yang benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan organisasi dengan tetap memperhitungkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pengelola objek wisata.

7. Struktur operasional yang jelas dan proses di luar jaringan. Indikator ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana struktur dan hubungan dengan lingkungan luar organisasi.

C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan sebagai suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Menurut Creswell dalam Djam'an dan Aan (2020: 30) penelitian kualitatif adalah suatu proses *inquiry* tentang pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis terpisah; jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah social atau manusia. Peneliti membangun suatu kompleks, gambaran holistik, meneliti kata-kata, laporan-laporan memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu pengaturan yang alami. Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan proses pengambilan data. Penulis menetapkan lokasi penelitian di Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada tata kelola Pariwisata di Kabupaten Tangamus Studi Pada Destinasi Wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman sehingga kemudian dapat dilakukan komparasi tata kelola dari dua objek wisata tersebut agar dapat diketahui apakah suatu objek wisata dapat lebih baik ketika ada campur tangan pemerintah daerah atau hanya dengan dikelola oleh swasta suatu objek pariwisata akan lebih baik. Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan tersebut dalam penelitian ini menggunakan teori *Environmental governance network* yang diadaptasi dari penelitian (ErkuşÖztürk & Eraydn, 2010), (Provan & Kenis, 2008), (Beaumont & Dredge, 2010). Berikut penjelasan fokus penelitian yang dianalisis melalui 7 indikator:

1. Budaya positif, Komunikasi konstruktif, komunitas yang terlibat
2. Transparan dan akuntabilitas
3. Visi dan kepemimpinan
4. Penerimaan dalam keberagaman (toleransi)
5. Mengembangkan pengetahuan, belajar dan berbagi keahlian
6. Peran dan tanggung jawab peserta yang jelas
7. Struktur operasional yang jelas dan proses di luar jaringan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini teori Parameter *Environmental Governance Network* yang diadaptasi dari elemen klasifikasi jaringan tata kelola menurut (ErkuşÖztürk & Eraydn, 2010), persepsi pemangku kepentingan menurut (Provan & Kenis, 2008) tentang EGN dan karakteristik jaringan menurut (Beaumont & Dredge, 2010) tentang ketegangan, dan parameter efektivitas jaringan tata kelola, yang digunakan untuk mengetahui perbedaan tata kelola pariwisata di dua destinasi wisata yang dikelola swasta dan juga pemerintah yaitu pada destinasi wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman. Terdiri dari sebagai berikut:

1. Budaya Postif, Komunikasi Konstruktif, komunitas yang terlibat

Budaya positif, Komunikasi konstruktif, komunitas yang terlibat Menurut parameter teori *Environmental governance network* yang diadaptasi dari penelitian (ErkuşÖztürk & Eraydn, 2010), (Provan & Kenis, 2008), (Beaumont & Dredge, 2010) merupakan parameter yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada menganalisis terkait budaya yang tercipta, komunikasi yang dilakukan dan dari sektor mana saja yang ikut berkontribusi dalam

melakukan tata kelola suatu pariwisata pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman.

Budaya positif, Komunikasi konstruktif, komunitas yang terlibat yang terdapat pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan sudah sangat kompleks pada *stakeholder* yang menunjang tata kelola. Pada pengelolaan objek wisata Air Terjun Way Lalaan terdapat 3 elemen yang membantu dan terlibat dalam tata kelola Air Terjun Way Lalaan yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, pihak swasta CV. Birawa dan Pokdarwis Air Terjun Way Lalaan. Dalam kolaborasi tata kelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus berperan sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan CV. Birawa berperan sebagai operator pada lapangan dan Pokdarwis berperan untuk mempromosikan objek wisata.

Hasil penelitian yang berbeda didapatkan pada objek wisata Bukit Idaman bertempat di Pekon Gisting Atas yang hanya dikelola oleh pribadi atau swasta, karena hanya dikelola oleh satu pihak, maka pendanaan dan anggaran pada objek wisata menggunakan dana pribadi pemilik. Walaupun objek wisata Bukit Idaman merupakan objek wisata milik pribadi, sehingga pengelola objek wisata Bukit Idaman dituntut untuk melakukan inovatif dalam pengelolaan objek wisata. Hal ini dimulai dengan masyarakat sekitar yang diperbolehkan untuk berjualan dalam lingkungan objek wisata dan pihak Bukit Idaman dalam proses pembangunan selalu menggunakan pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar dan diberi ruang untuk menuangkan kreativitasnya dalam melakukan pekerjaan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pihak pengelola objek wisata Bukit Idaman dalam membuka lapangan pekerjaan tambahan dalam membantu perekonomian masyarakat sekitar objek wisata dan menggunakan pekerja kreatif dalam pembangunan yang ada di sekitar objek wisata.

Dapat disimpulkan bahwa Tata kelola pariwisata pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan lebih baik dibandingkan dengan tata kelola pada objek wisata Bukit Idaman yaitu pada *stakeholder* pendukung yang sangat kompleks, karena terdapat peran pemerintah, swasta dan masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis Air Terjun Way Lalaan, Meskipun tata kelola objek wisata Bukit Idaman hanya dikelola oleh pihak Bukit Idaman, hal ini memiliki kelebihan pada anggaran pendanaan yang langsung dapat digunakan tanpa melewati banyak *stakeholder*.

2. Transparan dan Akuntabilitas

Strategi Transparan dan Akuntabilitas menurut parameter teori Environmental governance network yang diadaptasi dari penelitian (Erkuş-Öztürk & Eraydın, 2010), (Provan & Kenis, 2008), (Beaumont & Dredge, 2010) mengacu pada menganalisis terkait tata kelola yang baik karena menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, memberi wewenang pada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan dalam suatu sistem tata kelola kepariwisataan yang dapat dipertanggung jawabkan setelahnya. Transparan dan Akuntabilitas yang terjadi pada tata kelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu seperti pada penggunaan dana dan anggaran yang berasal dari APBN dan APBD harus diketahui jelas bagaimana dan apa saja penggunaannya, maka dari itu dana dan anggaran harus melewati berbagai dinas terkait lain dalam penggunaannya yaitu Dinas Pariwisata Tanggamus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Keuangan dan Bappeda karena yang melingkupi dana anggaran dan dana yang digunakan dalam pembangunan pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan ialah dana APBN dan APBD sehingga penggunaan dana dan anggaran jelas untuk digunakan apa saja agar tidak adanya penyelewengan dana dan orang di luar instansi terkait tidak dapat melihat rincian dana dan

anggaran digunakan untuk apa karena ada pertanggung jawaban setelahnya terkait penggunaan dana oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus kepada instansi lain.

Sedangkan pada tata kelola objek wisata Bukit Idaman, transparansi dan akuntabilitas merupakan wewenang pihak pengelola Bukit Idaman, karena objek wisata Bukit Idaman merupakan tempat wisata pribadi atau swasta maka penggunaan dana dan anggaran menggunakan dana pribadi untuk pendapatan pribadi pemilik objek wisata dan orang lain tidak dapat melihat bagaimana rincian dana tersebut. Tanggung jawab yang timbul hanya pada pengelola objek wisata kepada pemilik Bukit Idaman. Terdapat kelebihan pada objek wisata Bukit Idaman yaitu dana dan anggaran langsung dapat digunakan tanpa melewati banyak *stakeholder* namun pengelola dan pemilik objek wisata Bukit Idaman harus terus memonitoring penggunaan dana agar tidak dipersalahkan oleh oknum pengelola.

Disimpulkan bahwa pada penerapan transparan dan akuntabilitas pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan lebih baik daripada objek wisata Bukit Idaman, hal ini karena adanya *stakeholder* lain yang berperan dalam memonitoring penggunaan dana dan anggaran oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus. Sedangkan pada tata kelola objek wisata Bukit Idaman yang hanya dimiliki oleh pribadi dan untuk pendapatan pribadi maka tidak ada yang memonitoring akan penggunaan dana dan anggaran.

3. Visi dan Kepempinan

Visi dan Kepemimpinan menurut parameter teori Environmental governance network yang diadaptasi dari penelitian (Erkuş-Öztürk & Eraydın, 2010), (Provan & Kenis, 2008), (Beaumont & Dredge, 2010) mengacu pada kemampuan manajer dalam mengelola suatu organisasi atau mengelola seluruh kegiatan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi sebagai tujuan untuk melancarkan pelaksanaan prinsip tata kelola pariwisata yang baik pada objek wisata Air Terjun Waylalaan dan Bukit Idaman.

Dalam tata kelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan menunjukkan bahwa Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus menggunakan gaya kepemimpinan visioner. Karena kepemimpinan visioner dianggap sebagai salah satu jenis kepemimpinan yang paling efektif dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi di era globalisasi yang penuh dengan perubahan artinya organisasi tersebut secara aktif mengembangkan investasi dan tabungan untuk masa depan. Di bawah kepemimpinan visioner akan mampu membalikkan kecenderungan ini menuju perubahan yang berarti.

Hal yang sama ditunjukkan pada gaya kepemimpinan yang terjadi pada objek wisata

Bukit Idaman yaitu pemilik Bukit Idaman merupakan seorang yang visioner. Pemilik Bukit Idaman awalnya hanya memfokuskan pada pengembangan agrowisata kopi idaman namun karena dilihat ada sesuatu hal baru yang dapat dikelola, maka dikembangkanlah taman serta beberapa wahana yang ada di objek wisata Bukit Idaman sembari melakukan penambahan pada wahana-wahana yang ada di Bukit Idaman.

Maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola pariwisata pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman dalam kepemimpinan struktur pengelolaan pariwisata menggunakan gaya kepemimpinan visioner, karena dapat menyesuaikan pada perubahan dan memiliki ide untuk pembangunan dan pengelolaan di masa depan. Tujuan pemimpin melakukan pengelolaan ialah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Penerimaan dalam Keberagaman (Toleransi)

Penerimaan Dalam Keberagaman (Toleransi) Menurut parameter teori Environmental governance network yang diadaptasi dari penelitian (ErkuşÖztürk & Eraydın, 2010), (Provan & Kenis, 2008), (Beaumont & Dredge, 2010) sebagai bentuk toleransi terhadap keberagaman yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Mulai dari pemerintah, pengelola wisata, masyarakat sekitar, hingga wisatawan. Apabila suatu pariwisata dapat dikelola dengan baik, maka pariwisata itu dapat menjadi wadah untuk lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan wisata objek wisata Air Terjun Waylaan dan Bukit Idaman.

Bentuk toleransi atas adanya keberagaman yang tercipta pada lingkungan objek wisata Air Terjun Way Lalaan antara Dinas Pariwisata dan masyarakat sekitar yaitu masyarakat mulai merasa memiliki akan adanya wisata di Pekon Kampung Baru yang harus dimajukan. Masyarakat sekitar Air Terjun Way Lalaan yang juga tergabung sebagai anggota Pokdarwis diperbolehkan untuk usaha di dalam lingkungan air terjun. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus dalam mendukung seni budaya yang ada di Pekon Kampung Baru, memberikan izin panggung A dan panggung B yang ada di lingkungan

Air Terjun Way Lalaan untuk digunakan dalam latihan tari oleh sanggar tari yang ada di Pekon Kampung Baru. Hal ini sebagai bentuk dukungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus dalam pelestarian budaya oleh masyarakat sekitar.

Kemudian pada objek wisata Bukit Idaman hal yang senada terjadi seperti pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan yaitu dengan memperbolehkan masyarakat sekitar untuk berjualan dan usaha di dalam lingkungan objek wisata dan pihak pengelola objek wisata Bukit Idaman selalu menggunakan pekerja dari masyarakat sekitar dalam proses pembangunan serta pemeliharaan pohon kopi pada agrowisata Bukit Idaman.

Dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Dalam Keberagaman (Toleransi) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus ialah lebih baik daripada Pengelola Bukit Idaman. Hal ini karena, pada tata kelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan terdapat elemen masyarakat dalam tata kelola pariwisatanya yang tergabung dalam Pokdarwis Air Terjun Way Lalaan sedangkan dalam tata kelola pada objek wisata Bukit Idaman tidak terdapat elemen masyarakat. Dengan adanya Pokdarwis maka dapat membantu menjangkau lebih luas dalam mempromosikan suatu objek wisata. Masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis turut memiliki andil dalam memajukan dan mengembangkan objek wisata yang ada di desa mereka. Selain itu tujuan Pokdarwis ini agar Dinas Pariwisata Tanggamus dapat menjangkau wisatawan dengan masif dari bantuan masyarakat baik dari segi promosi, jual beli sektor UMKM seperti makanan khas Tanggamus “Otak- Otak” dan kegiatan kemasyarakatan dengan unsur budaya setempat.

5. Mengembangkan Pengetahuan Belajar dan Berbagi Keahlian

Mengembangkan Pengetahuan, Belajar dan Berbagi Keahlian Menurut parameter teori Environmental governance network yang diadaptasi dari penelitian (Erkuş-Öztürk & Eraydın, 2010), (Provan & Kenis, 2008), (Beaumont & Dredge, 2010) indikator ini mengacu sebagai upaya untuk menggali lebih dalam kemampuan para pemangku dari berbagai sektor pendukung pariwisata dan manfaat yang ditimbulkan dari hubungan dengan lingkungan sekitar objek wisata Air Terjun Waylaan dan Bukit Idaman. Objek wisata Air Terjun Way Lalaan yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, CV. Birawa dan Pokdarwis Way Lalaan dalam proses pengembangan pengetahuan dan keahlian, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus gencar melakukan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk meningkatkan skill dan ilmu para anggota Pokdarwis yang Kabupaten Tanggamus. Pelatihan yang diberikan seperti pelatihan tata kelola destinasi, pelatihan tata kelola homestay, pelatihan tata kelola pemandu wisata kuliner, pelatihan penyelamatan dalam air (*water rescue*) dan juga memberikan studi tiru keluar kota dalam menambah wawasan kepada

anggota Pokdarwis yang ada di Tanggamus salah satunya Pokdarwis Air Terjun Way Lalaan. Namun tidak hanya anggota Pokdarwis Air Terjun Way Lalaan yang mendapatkan pelatihan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus jika melakukan pelatihan dengan mengundang anggota Pokdarwis yang ada di lingkungan Kabupaten Tanggamus dan pelatihan tersebut tidak dikenakan biaya karena sudah dibiayain oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena pada objek wisata Bukit Idaman yang dikelola oleh pribadi atau swasta tidak menyelenggarakan pelatihan di internal Bukit Idaman, maka untuk mengembangkan skill dan pengetahuan SDM dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata.

Dapat disimpulkan bahwa pada parameter mengembangkan pengetahuan, belajar dan berbagi keahlian lebih unggul dan baik pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan yang langsung dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus daripada objek wisata Bukit Idaman yang dikelola oleh pribadi, karena Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus merupakan instansi yang mengelola dan mengurus terkait pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus dalam mengembangkan skill dan pengetahuan para pelaku usaha dan aktor pengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Pelatihan yang diberikan seperti pelatihan tata kelola destinasi, pelatihan tata kelola *homestay*, pelatihan tata kelola pemandu wisata kuliner, pelatihan penyelamatan dalam air (*water rescue*) dan juga memberikan studi tiru keluar kota dalam menambah. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus jika melakukan pelatihan dengan mengundang anggota Pokdarwis yang ada di lingkungan Kabupaten Tanggamus dan pelatihan tersebut tidak dikenakan biaya karena sudah dibiayain oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

6. Peran dan Tanggung Jawab Peserta yang Jelas

Peran dan Tanggung Jawab peserta yang jelas menurut parameter teori Environmental governance network yang diadaptasi dari penelitian (ErkuşÖztürk & Eraydın, 2010), (Provan & Kenis, 2008), (Beaumont & Dredge, 2010) ialah organisasi berupaya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar melalui pengelolaan yang benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan organisasi dengan tetap memperhitungkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pengelola objek wisata Air Terjun Waylaan dan Bukit Idaman.

Pembagian akuntabilitas atau tanggung jawab terjadi pada kondisi dimana setiap pemangku kepentingan saling berbagi dalam *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen) kegiatan pengambilan keputusan, dan tanggung jawab secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam tata kelola pariwisata pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus berperan sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan CV. Birawa berperan sebagai operator dan Pokdarwis sebagai elemen pendukung dan promosi yang mengurus terkait keindahan taman dan kebersihan kemudian Pokdarwis yang berperan sebagai elemen pendukung dalam promosi objek wisata. Adanya pembagian peran pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan membuat tata kelola dapat maksimal karena adanya pembagian tugas hingga dapat dilakukan dengan maksimal antar *stakeholder*. Berbeda dengan objek wisata Bukit Idaman yang dikelola oleh swasta atau milik pribadi sehingga peran dan tanggung jawab dilakukan langsung oleh pengelola objek wisata, seperti pada penjualan tiket dan proses pembangunan yang dilakukan oleh pengelola Bukit Idaman yang merupakan tugas dan tanggung jawab langsung dari pemilik Bukit Idaman. Kesimpulan dari indikator Peran dan Tanggung Jawab peserta yang jelas ialah lebih baik objek wisata Air Terjun Way Lalaan daripada objek wisata Bukit Idaman, karena adanya pembagian tugas dan wewenang yang dilakukan oleh pengelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan sehingga tata kelola dapat dilakukan dengan maksimal tidak terpaku pada satu *stakeholder* dalam pengelolaan.

7. Struktur operasional yang jelas dan proses di luar jaringan

Struktur operasional yang jelas dan proses di luar jaringan menurut parameter teori Environmental governance network yang diadaptasi dari penelitian (Erkuş-Öztürk & Eraydın, 2010), (Provan & Kenis, 2008), (Beaumont & Dredge, 2010) indikator ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana struktur dan hubungan dengan lingkungan luar organisasi pada objek wisata Air Terjun Waylaan dan Bukit Idaman. Pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan yang terdapat pada struktur tata kelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, CV. Birawa dan Pokdarwis Air Terjun Way Lalaan sehingga tata kelola dapat terselenggara dengan jelas akan pembagian tugas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya kolaborasi instansi pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan menimbulkan hubungan antar lingkungan luar yaitu Pekon Kampung Baru sangat mendukung adanya objek wisata yang ada di Pekon Kampung Baru, karena mendapat dukungan dari masyarakat sekitar objek wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus memberikan ijin kepada masyarakat sekitar untuk dapat menggunakan Panggung untuk latihan tari oleh sanggar tari yang ada di Pekon Kampung Baru dengan sudah di fasilitasi listrik dan *soundsystem* pada hari sabtu dan minggu.

Berbeda dengan objek wisata Air Terjun Way Lalaan. Pada objek wisata Bukit Idaman hanya terdapat pengelola tunggal yaitu dari pihak pengelola Bukit Idaman tanpa adanya campur tangan *stakeholder* lainnya sehingga upaya pertanggung jawaban hanya dilakukan oleh pengelola kepada pemilik objek wisata Bukit Idaman. Namun terdapat kesamaan pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman yaitu pada hubungan di luar internal pengelola yaitu hubungan dengan masyarakat. Pengelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan memberikan ijin terhadap masyarakat sekitar untuk usaha atau berjualan di dalam lingkungan Way Lalaan dan memberikan izin untuk dipergunakannya panggung A yang terdapat pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan untuk digunakan oleh masyarakat seperti pada latihan tari oleh sanggar tari yang terdapat di Pekon Kampung Baru. Hal senada terjadi pada lingkungan objek wisata Bukit Idaman, pengelola memberikan ijin kepada masyarakat sekitar Bukit Idaman untuk melakukan usaha atau berjualan di dalam lingkungan objek wisata Bukit Idaman. Pengelola objek wisata Bukit Idaman pernah mengajukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pekon Gisting Atas namun belum ada respon kesepakatan kerjasama yang terjalin antara pengelola Bukit Idaman dengan Bumdes Pekon Gisting Atas, sehingga sampai saat ini hanya pengelola dari pihak Bukit Idaman yang memiliki wewenang dalam pengelolaan objek wisata Bukit Idaman.

Kesimpulan dari indikator struktur operasional yang jelas dan proses di luar jaringan ialah objek wisata Air Terjun Way Lalaan lebih unggul dan baik daripada objek wisata Bukit Idaman, karena terdapat beberapa *stakeholder* lain yang turut andil dalam tata kelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan sehingga menimbulkan pembagian tugas yang jelas antar *stakeholder*, berbeda dengan objek wisata Bukit Idaman yang hanya dikelola oleh pribadi maka tugas dan pertanggung jawaban hanya dilakukan sendiri dan tata kelola besar kemungkinan tidak berjalan dengan maksimal karena hanya dilakukan sendiri. Namun, terdapat persamaan pada hubungan dengan masyarakat sekitar objek wisata yaitu dengan memberikan ijin masyarakat sekitar untuk menggunakan fasilitas yang ada di dalam objek wisata, masyarakat diperbolehkan untuk usaha dan berjualan di dalam objek wisata dan dalam proses pembangunan yang menggunakan tenaga masyarakat sekitar objek wisata, hal ini merupakan bagian dalam membuka lapangan pekerjaan baru.

E. KESIMPULAN

Hasil Komparasi Tata Kelola Pariwisata di Kabupaten Tanggamus dengan studi pada destinasi wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman, didapatkan hasil tata kelola pariwisata pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan lebih baik daripada objek wisata Bukit Idaman dengan merujuk pada 7 indikator yang digunakan pada penelitian ini. Hal ini didukung dengan *stakeholder* tata kelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan yang sangat kompleks karena terdiri atas pemerintah daerah, swasta dan juga elemen masyarakat. Adanya pembagian peran pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan membuat tata kelola dapat maksimal karena adanya pembagian tugas hingga dapat dilakukan dengan maksimal antar *stakeholder*.

Namun terdapat kekurangan pada satu indikator pada tata kelola pariwisata Air Terjun Way Lalaan ialah Transparan dan akuntabilitas yaitu dalam hal penganggaran dana harus melewati banyak *stakeholder* seperti Dinas Pariwisata Tanggamus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Keuangan dan Bappeda, karena dana dan anggaran menggunakan dana APBD dan APBN dan APBD maka harus jelas rincian penganggaran digunakan untuk apa. Dan pada objek wisata Bukit Idaman karena hanya dikelola pribadi maka penganggaran dana langsung dari pemilik objek wisata.

Hasil dari penelitian ini dengan peneliti yang mengambil dua objek wisata yang berbeda tata kelolanya, dimana pada objek wisata Air Terjun Way Lalaan yang dikelola oleh pemerintah dan objek wisata Bukit Idaman yang dikelola oleh pribadi. Karena jika didapati hasil penelitian berupa tata kelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan lebih baik dan unggul, maka objek wisata Bukit Idaman dapat belajar dan mencontoh apa yang dilakukan dalam tata kelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan dan dapat diterapkan dan aplikasikan oleh pengelola Bukit Idaman sebagai acuan dalam pengembangan tata kelola objek wisata Bukit Idaman untuk lebih baik kedepannya.

Saran

Adapun rekomendasi saran untuk pengelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan dan Bukit Idaman khususnya dalam tata kelola pariwisata di Kabupaten Tanggamus antara lain:

1. Diperlukan adanya perhatian lebih dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus terkait peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata Air Terjun Way Lalaan menjadi lebih baik dan berkembang karena hal tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang akan datang.

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus harus memanfaatkan setiap potensi yang ada termasuk peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata sehingga apa yang menjadi tujuannya itu tercapainya objek wisata unggulan Air Terjun Way Lalaan dapat terlaksana sesuai apa yang sudah direncanakan.

3. Memaksimalkan koordinasi antar *stakeholder* baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dan swasta (vertikal dan horizontal).

4. Pengelola Bukit Idaman dalam pengelolannya diharapkan terdapat kerjasama antar pihak pengelola dan masyarakat sebagaimana pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan kepuasan terhadap pengunjung sehingga penting bagi pengelola untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kearifan budaya lokal.

5. Pelatihan dan sosialisasi baik sosialisasi mengenai pengelolaan atau sosialisasi tentang sadar wisata, Pengelola objek wisata Bukit Idaman diharapkan untuk dapat secara terus menerus mengikuti kegiatan pelatihan yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Tanggamus dalam memaksimalkan, menambah *skill* dan pengetahuan sumber daya manusia yang ada.

6. Pada tata kelola pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus dibutuhkan peran NGO (Non-Governmental Organization). Karena NGO tidak berpihak dan tidak berhubungan dengan negara, maka kenggotaannya bersifat sukarela, NGO memiliki peran yang strategis dalam pembinaan masyarakat, memberikan pendidikan dan membangun kesadaran masyarakat, menjadi pendamping masyarakat, dan mengkritisi jalannya pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, S. (2017). Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Kabupaten Tuban [Other, Beaumont, N., & Dredge, D. (2010). Local tourism governance: A comparison of three network approaches. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(1), 7–28. <https://doi.org/10.1080/09669580903215139>
- Erkuş-Öztürk, H., & Eraydın, A. (2010). Environmental governance for sustainable tourism development: Collaborative networks and organisation building in the Antalya tourism region. *Tourism Management*, 31(1), 113– 124. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.01.002>
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Safitri, W. (t.t.). Tata Kelola Kepariwisata Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 104.
- Satori, Djam'an., & Komariah, Aan.(2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
University of Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/35932/>